

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DI DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

Abdiana Ilosa¹, Zulhaida², Mike Nurjana³

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email: Abdiana@uin-suska.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the implementation and the inhibiting factors of the Sembako Program in Karya Indah Village, Tapung District, Kampar Regency. With research indicators on target accuracy, program socialization, program objectives, and program monitoring. The type of research used is qualitative research with qualitative descriptive data analysis techniques with percentages. From this study it can be concluded that in Karya Indah Village, Tapung District, Kampar Regency, it is not yet effective enough in implementing the Basic Food Program seen from the inaccuracy of targeting the community receiving the Basic Food Program, the KPM still lacks understanding of the social assistance they receive, as well as monitoring that has not been carried out to KPM. so that the achievement of goals has not been carried out optimally.

Keywords: *Effectiveness, Public Policy, Basic Food Program*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan dan faktor penghambat Program Sembako di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dengan indicator penelitian *ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisa data deskriptif kualitatif dengan persentase. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar belum cukup Efektif dalam pelaksanaan Program Sembako dilihat dari masih adanya ketidaktepatan sasaran masyarakat penerima Program Sembako, masih kurangnya pemahaman KPM terhadap bantuan sosial yang mereka terima, serta pemantauan yang belum dilaksanakan kepada KPM sehingga pencapaian tujuan belum terlaksana secara maksimal.

Kata Kunci : *Efektivitas, Kebijakan Publik, Program Sembako*

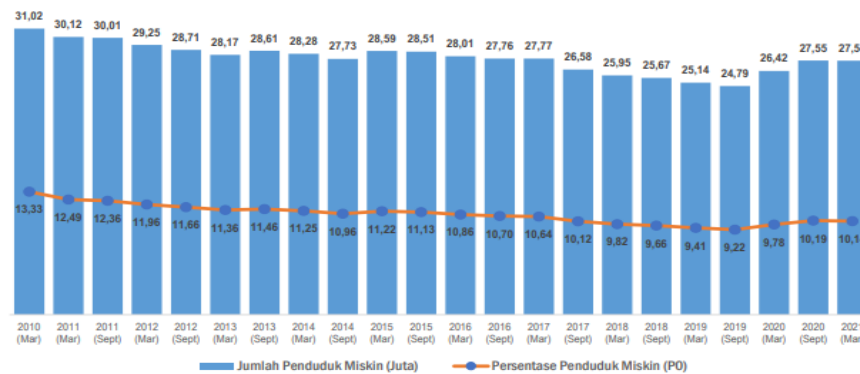
1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan ekonomi, permasalahan ekonomi muncul pada saat kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya atau faktor produksi yang terbatas (Imanuel 2007). Permasalahan ekonomi terbagi menjadi dua yaitu masalah ekonomi mikro dan masalah ekonomi makro. Dalam ekonomi mikro permasalahan ekonomi yang terjadi diantaranya masalah penentuan harga dasar dan harga tertinggi, mekanisme harga pasar, masalah distribusi dan lain-lain. Sedangkan masalah ekonomi makro diantaranya inflasi, kemiskinan, pengangguran, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain (Curatman, 2010). Menurut BAPPENAS indikator utama kemiskinan suatu wilayah dapat dilihat sebagai berikut : 1). Kurangnya pangan, sandang, dan perumahan yang tidak layak; 2). Terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; 3). Kurangnya kemampuan membaca dan menulis; 4). Kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; 5). Kerentanan jaminan dan kesejahteraan hidup; 6). Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; 7). Ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah; 7). Akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mensejahterakan kehidupan rakyat. Salah satu bentuk upaya peran pemerintah dalam mensejahterakan rakyat yaitu dengan menjalankan program-

program penanggulangan kemiskinan. Pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Untuk fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai pewujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara miskin dan tidak mampu. Adapun jumlah angka kemiskinan di Indonesia dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maret 2010-Maret 2021



Sumber: Diolah dari data survei sosial ekonomi nasional (Susenas)

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mengentas kemiskinan yaitu adanya program sembako. Program sembako merupakan perogram pemerintah yang sumber dananya berasal dari pemerintah pusat melalui kementerian sosial (Kemensos) yang kemudian dilanjutkan oleh dinas Sosial/Kabupaten se indonesia untuk di salurkan kepada sasaran KPM.

Program Sembako merupakan transformasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sebelumnya program ini telah bertransformasi berulang kali, dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK), Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Beras Untuk Masyarakat Sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Bantuan Program Sembako. Program OPK (1998), Raskin (2002), dan Rasrta (2016) belum menggunakan sistem kartu elektronik (E-warong). Komoditas bahan yang disalurkan dalam bentuk pangan yaitu berupa beras.

Program BPNT ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai. Program ini juga dalam rangka mendukung SNKI sesuai Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. E-warong merupakan program pemerintah untuk pencairan dana bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dengan sistem nontunai, yang memanfaatkan teknologi jaringan internet sekaligus sebagai sarana memperlancar BPNT (Pramesti, dkk 2019). Dengan perubahan mekanisme penyaluran bantuan yang tidak lagi berbentuk beras namun menjadi dana bantuan yang disalurkan langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dana ini kemudian harus ditukarkan dengan telur dan beras di agen yang sudah ditetapkan.

Pada tahun 2020, program BPNT berganti nama menjadi Program Sembako. Dana bantuan yang diberikan dalam Program Sembako tidak hanya dapat dibelanjakan untuk beras dan telur saja, namun juga untuk sumber karbohidrat, protein dan vitamin lainnya seperti jagung, daging ayam, daging sapi, kacang-kacangan, sayur atau buah yang dapat diperoleh di pasar lokal. Kebijakan stimulus fiskal yang telah diputuskan, memberikan instrumen baru bagi pemerintah untuk meminimalkan dampak sosial ekonomi Covid-19 pada tingkat rumah tangga. Melalui perluasan kepesertaan Program Sembako pemerintah berupaya untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi.

Program sembako yaitu bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp.200.000/KPM, melalui mekanisme akun elektronik berupa kartu keluarga sejahtera (KKS) yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan bank himpunan bank Negara (Himbara) yang kemudian disebut ewarong. (Dini dkk, 2018). Penerima Manfaat program

sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Tabel 1.1 : Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) DTKS Desa Karya Indah

No	Nama Dusun	Jumlah KPM
1	Dusun I Sei Sibam	39
2	Dusun II Sei Pantau	14
3	Dusun III Kandis Baru	21
4	Dusun IV Karya Damai	19
Jumlah		93

Sumber : Kantor Desa Karya Indah 2021

Adanya program pemerintah tersebut ditujukan sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu agar dapat mewujudkan keluarga sejahtera. Efektivitas program bantuan sembako tidak bisa dilihat secara parsial hanya berdasarkan pada kinerja instansi tertentu saja.

Tabel 1.2 : Data Keluarga Penerima Manfaat Program Sembako

No	Jumlah KPM Program Sembako (KK)	Tahun
1	103 kepala Keluarga	2019
2	143 Kepala Keluarga	2020
3	135 Kepala Keluarga	2021

Sumber : Data kantor Desa karya indah 2021

Mekanisme pencairan Program Sembako yaitu menggunakan kartu elektronik yang disebut KKS yang ditukarkan dalam bentuk bahan pangan di E-warong yang merupakan program pemerintah untuk pencairan dana bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dengan sistem nontunai, yang memanfaatkan teknologi jaringan (Pramessti dkk, 2019). Proses pemanfaatan dana bantuan program sembako dilaksanakan dengan tahapan, KPM datang ke E-warong dengan membawa KKS, KPM melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau mesin EDC, KPM memilih jenis dan menentukan jumlah bahan pangan sesuai kebutuhan, KPM melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN pada mesin EDC, KPM menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari mesin EDC.

Di Desa Karya Indah belum tersedianya E-warong, berdasarkan wawancara singkat dengan aparatur desa yang menjadi penyalur bantuan program sembako, dikatakan bahwa pengambilan sembako dilakukan di desa tetangga, ataupun di Kecamatan Tapung. Pengambilan sembako dilakukan oleh salah satu perwakilan aparatur desa. Mekanisme pengambilan sembako di Desa Karya Indah yaitu, KPM memberikan kartu KKS kepada aparatur sebagai syarat untuk pencairan Program Sembako, dan menunggu informasi selanjutnya terkait kapan pencairan sembako dilakukan. Berdasarkan informasi dari aparatur bagian kesejahteraan sosial terkait waktu ataupun jadwal penyaluran program sembako, dikatakan bahwa pencairan tidak memiliki waktu yang pasti setiap bulannya.

Masih banyaknya pemberitaan bahwasannya ketidak tepatan sasaran dalam penyaluran bantuan program sembako seolah menandakan ketidak efektifan dalam penyaluran yang dilakukan oleh pemerintah. Di Kecamatan Tapung terdapat 3625 KPM program sembako, dan di Desa Karya Indah sendiri terdapat 135 KPM penerima program sembako tahun 2021, banyak ditemukan warga yang secara ekonomi cukup mampu malah masuk sebagai penerima. Sedangkan warga yang tidak mampu justru tidak masuk dalam daftar penerima. Dari wawancara singkat dengan beberapa KPM program sembako ditemukan bahwasannya masih kurangnya pemahaman KPM terhadap program sembako, dan terkait sarana prasarana yaitu E-warong yang masih belum dimiliki Desa Karya Indah, padahal jumlah KPM bertambah setiap tahunnya.

2. Tinjauan Pustaka Kebijakan Publik

Kebijakan publik menitikberatkan pada “publik dan masalah-masalahnya”. Kebijakan publik membahas bagaimana isu-isu dan persoalan tersebut disusun, didefinisikan, serta bagaimana bagaimana persoalan tersebut masuk ke agenda kebijakan. Kebijakan memiliki beragam pengertian Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar. Perserikatan bangsa-bangsa sendiri memberikan makna kebijakan berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana tertentu.

Efektivitas

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif di ambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruh atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu. Menurut John. M. Echols dan Hasan Shadily dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia secara etimologi efektivitas dari kata efek yang artinya berhasil guna.

Dapat dikatakan efektif jika tujuan atau sasaran tersebut telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini didukung oleh pendapat menurut Sumaryadi (2005), mengatakan bahwa efektivitas dalam organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Sedangkan Pasolong (2007) menjelaskan bahwa pada dasarnya efektivitas berasal dari kata “efek”, dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab-akibat. Efektivitas dipandang sebagai suatu “sebab” dari variabel lain. Menurut Kartikahadi efektivitas merupakan produk akhir dari suatu kegiatan operasi yang telah mencapai tujuannya baik di tinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, serta batas waktu yang ditargetkan (Rosaliana & Hardjati, 2019).

Program sembako

Tujuan Program Sembako 1). Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; 2).Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;3).Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah harga, kualitas, dan administrasi; dan 4). Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Program Sembako merupakan transformasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sebelumnya program ini telah bertransformasi berulang kali, dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK), Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Beras Untuk Masyarakat Sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Bantuan Program Sembako. Program OPK (1998), Raskin (2002), dan Rasrta (2016) belum menggunakan sistem kartu elektronik (E-warong). Komoditas bahan yang disalurkan dalam bentuk pangan yaitu berupa beras.

Tabel 2.1 Konsep operasional

Variabel	Indikator	Sub indikator
Efektivitas <i>Sumber: Olahan Peneliti dari teori Budiani Tahun 2021</i>	Ketepatan sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian keadaan ekonomi KPM dengan standar ketentuan penerima program sembako • Ketepatan waktu penyaluran Program Sembako
	Sosialisasi program	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian materi Program Sembako • Pemahaman KPM mengenai Program Sembako
	Tujuan program	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan • Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM • Kualitas bahan pangan yang disalurkan
	Pemantauan program	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan pelaksana program sembako terhadap KPM

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisa data deskriptif kualitatif dengan persentase artinya setelah data dikumpulkan, selanjutnya data tersebut di klasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data deskriptif dan data persentase. Kemudian melakukan analisa dan didiskritifkan dengan menjelaskan efektivitas pelaksanaan program sembako di Desa Karya Indah. Dan data persentase digambarkan dalam bentuk angka-angka sebagai data pendukung. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan angket, observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. Hasil dan Pembahasan

Efektifitas pelaksanaan program Sembako di Desa Karya Indah

a. Ketepatan Sasaran Program Sembako di Desa Karya Indah

Setiap program ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memiliki sasaran yang jelas kepada siapa program itu ditujukan, dalam program sembako penerima manfaat program sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program sembako dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial. Di dalam buku Panduan Umum Program Sembako syarat utama sebagai penerima program sembako hanyalah masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksana dan terdaftar di DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data utama yang digunakan oleh pemerintah sebagai acuan dalam penerima program Sembako, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan data yang bersumber dari usulan pemerintah daerah yang kemudian disahkan oleh menteri sosial.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pendamping bantuan sosial pangan di Kecamatan Tapung pada pukul 11:29 WIB hari selasa tanggal 8 Februari 2022 menjelaskan bahwa:

“Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sekarang disebut sebagai bantaun Program Sembako merupakan bantuan uang dalam bentuk saldo yang hanya bisa dicairkan dalam bentuk bahan-bahan sembako di E-warung yang telah ditunjuk oleh pemerintah, saldo yang di terima keluarga penerima yaitu Rp200.000 per setiap bulannya yang mana saldo ini mengalami peningkatan yang awal mulanya Rp150.000 per setiap bulan.(wawancara 08 Februari 2022)

Ketepatan sasaran dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat 3 komponen atau subindikator yaitu, ketepatan sasaran penerima program sembako di Desa Karya Indah, ketepatan waktu penyaluran program sembako di Desa Karya Indah, dan Ketepatan bahan pangan yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat Program Sembako di Desa Karya Indah.

Dari hasil rekapitulasi keseluruhan dari indikator ketepatan sasaran di peroleh 51,5% setuju, hal ini membuktikan bahwasannya ketepatan sasaran program sembako kurang sesuai dilihat dari kriteria yang telah peneliti buat 31-69% tergolong cukup/kurang sesuai.

b. Sosialisasi Program Sembako Di Desa Karya Indah

Sosialisasi program sembako merupakan tugas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Penyalur dan Tenaga Pelaksana Bansos. Salah satu sasaran penerima edukasi dan sosialisasi Program Sembako adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hal ini penting untuk dilakukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkhususnya masyarakat awam atau yang masih belum fasih dalam teknologi, dikarenakan sasaran penerima program sembako adalah masyarakat dengan keadan sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksana.

Dari hasil rekapitulasi kuisisioner dengan KPM program sembako disimpulkan bahwa rendahnya sosialisasi program sembako di Desa Karya Indah dilihat dari rendahnya persentase yang setuju yaitu 25% yang hal ini tergolong tidak sesuai atau belum efektif. Diketahui bahwa sosialisasi belum dilakukan secara langsung kepada KPM program sembako, sosialisasi hanya dilakukan pada pihak-pihak penanggung jawab dan pada pihak E-warung sebagai pihak pelaksana.

c. Tujuan Program Sembako Di Desa Karya Indah

Berdasarkan buku pedoman umum program sembako yang dikeluarkan oleh kementerian sosial tujuan program sembako sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM

3. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah harga, kualitas, dan administrasi
4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Dari hasil rekapitulasi tujuan program sembako di Desa Karya Indah di peroleh 60% responden setuju dan 40% yang tidak setuju, hal ini disebabkan dari segi bahan yang disalurkan atau bahan sembako sesuai dengan ketentuan dari kementerian sosial namun dari segi pemilihan bahan sesuai dengan tujuan program sembako yaitu memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan belum terlaksana seperti seharusnya.

d. Pemantauan Program Sembako Di Desa Karya Indah

Dilakukannya pemantau adalah dengan tujuan sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sembako di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan Tim Pengendali yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan pemantauan dan evaluasi (PE) Pelaksanaan Program.
2. Kegiatan pemantauan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan program sembako pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan penyelesaiannya.
3. Kegiatan pemantauan dilakukan secara rutin/ berkala atau sesuai dengan kebutuhan (tematik). Pemantauan rutin melalui *dashboard*, rapat koordinasi, pemantauan media, dan pelaporan. Sedangkan pemantauan berkala berupa kegiatan uji petik (*spotcheck*) oleh tim lintas K/L dan daerah.
4. Kegiatan evaluasi dilakukan oleh pihak independen seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan instansi lainnya.
5. Kegiatan pemantauan dan evaluasi oleh Tim Pengendali dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dapat dilakukan secara berjenjang, sampai ke KPM bila diperlukan.
6. Tim Koordinasi Bansos Pangan di daerah secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi di wilayah kerja masing-masing.
7. Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis aplikasi dapat digunakan untuk pemantauan penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan program Sembako dari waktu ke waktu.
8. Pemantauan pelaksanaan program sembako dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada lampiran sebagai panduan. Hasil pemantauan dan evaluasi dianalisis dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan Tim Pengendali

Dari hasil rekapitulasi indikator pemantauan program sembako di Desa Karya Indah, diperoleh jawaban responden yang tidak setuju sebanyak 82% hal ini membuktikan bahwasanya pemantauan tidak dilaksanakan, yang mana pemantauan ini bertujuan agar masyarakat yang mendapatkan bantuan program sembako benar-benar orang yang layak sebagai penerima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemantauan program sembako belum efektif.

2. Faktor Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako Di Desa Karya Indah

Tujuan program sembako dalam Peraturan Menteri Sosial No. 5 tahun 2021 yaitu, mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah harga, kualitas, dan administrasi, memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Adanya bantuan program sembako ini diharapkan bisa mengurangi sebagian kebutuhan bahan pangan masyarakat dengan ekonomi lemah, dan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi, diberlakukannya sistem perbankan diharapkan bantuan yang disalurkan agar tepat pada sasaran dan meminimalisir kecurangan dalam penyaluran program. Ditinjau dari tujuan program sembako untuk membantu kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan mendasar dari masyarakat dibutuhkan efektifitas dalam pelaksanaan agar program sembako menjadi program yang berkelanjutan. Adapun hasil penelitian terkait efektifitas pelaksanaan program sembako di Desa Karya Indah ditemukan beberapa kendala, atau faktor-faktor penghambat sesuai indikator yaitu :

1. Ketepatan sasaran

Sehubungan dengan efektivitas program sembako di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung ada beberapa kendala yaitu:

a. Masih menggunakan data lama

-
- b. Belum adanya sekala waktu yang jelas terkait forum pengajuan penggantian KPM yang tidak memenuhi syarat.
 - c. Waktu pencairan program sembako yang tidak konsisten dikarenakan menyesuaikan dengan waktu masuknya saldo yang telah ditransfer oleh kementerian sosial
 - d. Kendala dari tidak tepatnya waktu penyaluran program sembako di Desa Karya Indah adalah keterlambatan saldo yang masuk ke kartu KPM, yang menyebabkan sulitnya pihak E-warong dalam menyediakan bahan sembako sehingga pelaksanaan program swembako di Desa Karya Indah belum Efektif dalam segi waktu.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan tahap awal untuk memperkenalkan kepada masyarakat apa bansos yang mereka terima, berapa nominal, dan apa tujuan dari program tersebut, sehingga tidak ada terjadinya kesalahpahaman diantara masyarakat maupun aparatur desa adapun kendala dalam sosialisasi adalah:

- a. Sulitnya mengumpulkan KPM di suatu tempat akibat covid-19
- b. Kurangnya pahamiannya KPM terhadap media digital
- c. Kurang transparannya aparatur penyalur
- d. Rendahnya rasa ingin tahu KPM terkait Program Sembako

Dari hasil wawancara dengan Aparatur Desa Karya Indah penanggung jawab Program Sembako dikatakan bahwa memang benar sosialisasi program sembako kepada KPM belum dilakukan, namun sosialisasi terhadap aparatur ataupun pemilik E-warong sudah dilakukan baik itu dalam bentuk seminar, maupun pelatihan online. dan beliau juga mengatakan bahwa kendala masih banyaknya KPM yang belum tau tentang program sembako adalah di lihat dari para KPM yang sudah tua sehingga masih buta terhadap teknologi, dan rasa ingin tahu masyarakat yang minim. Padahal buku pedoman umum program sembako sudah bisa didownload di website kementerian sosial ataupun di search di google.

3. Pemantauan Program

Adapun kendala dalam pemantauan program sembako yaitu:

- a. Terbatasnya ketersediaan jumlah pendamping

Berdasarkan wawancara penulis dengan pendamping bantuan sosial pangan di kecamatan Tapung pada pukul 11:29 WIB hari selasa tanggal 8 Februari 2022 menjelaskan bahwa:

“Sejauh ini memang belum dilakukan peninjauan langsung kepada KPM, namun kami sebagai pihak pendamping sudah melakukan peninjauan langsung ke tempat E-warong yang merupakan tempat pencairan Program Sembako, di E-warong juga kami pantau baik itu dari segi kelayakan bahan, dan kesesuaian dengan peraturan menteri sosial. kendala dalam melakukan peninjauan ini juga cukup sulit kami atasi karna dalam satu kecamatan hanya ada satu orang pendamping yang di tunjuk oleh dinas sosial, padahal di Kecamatan Tapung ini Terdapat 25 Desa yang jarak tempuhnya antar satu desa itu berjauhan, tidak seperti di Kota yang berdekatan. (wawancara 08 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pendamping bantuan sosial pangan di kecamatan Tapung benar belum dilaksanakannya pemantauan langsung kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) program sembako dikarenakan terbatasnya jumlah pendamping.

5. Simpulan

Pelaksanaan Program Sembako di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung belum terlaksana secara efektif dilihat masih adanya penerima Program Sembako yang tidak termasuk masyarakat sosial ekonomi lemah, dan masih tingginya persentase responden terkait belum terlaksananya sosialisasi program, dilihat dari masih banyak ditemukan masyarakat penerima atau KPM yang belum tahu jumlah atau nominal bantuan yang bisa dicairkan dalam bentuk sembako.

Kurangnya pemahaman KPM disebabkan oleh rendahnya rasa ingin tahu dan dikarenakan masih melakukan pencairan dengan bantuan aparatur desa hal ini disebabkan letak E-warong yang jauh, keadaan keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah tua dan alat transportasi yang kurang memadai, ditambah dengan kekhawatiran lupa sandi kartu KKS. Pemantauan dari pelaksana Program Sembako ataupun Pendamping Bantuan Sosial Pangan di Desa Karya Indah yang masih belum terlaksana, dikarenakan masih belum memadainya jumlah tenaga pendamping Bantuan Sosial Pangan di Kecamatan Tapung yang hanya memiliki 1 Pendamping untuk 25 desa dengan

jarak yang jauh antar satu desa dengan desa yang lain sehingga sulit untuk melakukan peninjauan secara langsung ke kediaman KPM.

Adapun faktor penghambat Pelaksanaan Program Sembako di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang penulis temukan di lapangan sebagai berikut :1). Masih menggunakan data lama;2). Belum adanya sekala waktu yang jelas terkait forum pengajuan penggantian KPM yang tidak memenuhi syarat; 4). Waktu pencairan program sembako yang tidak konsisten dikarenakan menyesuaikan dengan waktu masuknya saldo yang telah di transfer oleh kementerian sosial ; 5).Sulitnya mengumpulkan KPM di suatu tempat akibat covid-19; 6). Kurang pahamiannya KPM terhadap media digital; 7). transparannya aparatur penyalur; 8). Rendahnya rasa ingin tahu KPM terkait Program Sembako;9). Terbatasnya ketersediaan jumlah pendamping

Daftar Pustaka

- Arifin, Imamul, 2007, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, Bandung: PT. Setia Purna Inves.
- Budiani, Ni Wayan. 2007. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*.Jurnal Ekonomi dan Sosial.Vol 2 No. 1, 49-57.
- Curatman, Aang, 2010 *Teori Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Swagati Press.
- Dini, A. R., Nurmalisa, Y., & Halim, A. 2018. *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik*. Jurnal Kultur Demokrasi. Vol 5 No. 13,
- Pasolong, Harbani, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako
- Pramesiti, R., Muhammad, A. S., Safitri, D. P., Raja, M., & Haji, A. 2019. *Impelementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Gotong Royong Di Kota Tanjungpinang Implementation of Non-Cash Food Assistance Through Electronic Mutual Assistance in Tanjung Pinang City*. Spirit Publik, Vol 14 No. 1, 81–93.
- Rosaliana, A., & Hardjati, S. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya*. Public Administration Journal of Research, Vol 1 No 2, 96–111.
- Sumaryadi, I, N. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama.